

Peluang dan Tantangan Guru Sosiologi dalam Menghadapi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Revolusi Industri 4.0

Yuhastina * , Bagas Narendra Parahita , Dwi Astutik , Ghufronudin 
dan Danang Purwanto 

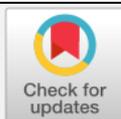
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret, 57126, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

* Korespondensi: yuhastina@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Yuhastina, Y., Parahita, B. N., Astutik, D., Ghufronudin, G., & Purwanto, D. (2020). *Sociology Teachers' Opportunities and Challenges in Facing “Merdeka Belajar” Curriculum in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)*. *Society*, 8(2), 732-753.

DOI: [10.33019/society.v8i2.234](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.234)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan Merdeka Belajar sebagai program pendidikan nasional bagi para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) secara nasional. Permasalahan yang dihadapi para guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar adalah kurangnya pemahaman mengenai tentang prosedur. Hal ini terjadi karena tidak adanya penjelasan secara struktural mengenai perbedaan antara kurikulum mereka jalankan yang selama ini dengan kurikulum Merdeka Belajar. Banyak masalah yang muncul ketika mengimplementasikan kurikulum tersebut bahwa pendidikan yang selama ini mereka jalankan telah membuat telah membuat siswa menjadi ketergantungan. Dalam konteks tersebut, kajian ini mempertanyakan bagaimana peluang dan tantangan guru Sosiologi SMA dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar di era revolusi industri 4.0? Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan strategi para guru dalam menghadapi paradigma baru Merdeka Belajar. Analisis dalam kajian ini berdasarkan sejumlah teori seperti dari Neill, Rogers, Freire, Boal, Giroux, dan Knowles untuk menganalisis secara kritis paradigma pedagogi pendidikan nasional yang selama ini digunakan para guru. Kajian ini menggunakan teori Knowles mengenai andragogi untuk mengupas pengertian Merdeka Belajar. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam kajian ini meliputi observasi hubungan guru-murid dan wawancara dengan sejumlah guru SMA di Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu kajian dokumen yang terkait dengan program Merdeka Belajar juga digunakan untuk memahami konteks kebijakan. Kajian ini menemukan bahwa para guru tidak menyadari bahwa mereka telah menggunakan paradigma

Dikirim: 17 September, 2020;
Diterima: 30 November, 2020;
Dipublikasi: 30 Desember, 2020;

pedagogi (pendidikan untuk anak-anak) untuk anak jenjang SMA yang telah dewasa. Ketika beralih ke kurikulum Merdeka Belajar mereka juga tidak mengetahui bahwa paradigma yang seharusnya mereka gunakan adalah andragogi (pendidikan untuk orang dewasa). Di dalam situasi ini, mereka berimprovisasi sebaik mungkin untuk menjalankan Merdeka Belajar. Para guru hanya menjalankan perintah dari sekolah untuk mencoba. Namun, sekolah juga masih berusaha memahami cara mengimplementasikannya berdasarkan tatanan struktural tanpa kejelasan. Ketergantungan siswa kepada guru telah menjadi penyebab sulitnya para guru keluar dari paradigma pedagogi menuju ke andragogi. Dalam situasi tersebut, para guru kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan program Merdeka Belajar di tengah pandemi Covid-19. Para guru dan sekolah juga harus menghadapi semua hambatan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi siswa dengan akses pembelajaran daring yang terbatas.

Kata Kunci: Andragogi; Guru Sosiologi; Kurikulum; Merdeka Belajar; Pedagogi

1. Pendahuluan

Sistem pendidikan di tingkat SMA telah menggunakan paradigma pedagogi. Paradigma ini telah dikritik tajam oleh Paulo Freire dan Henry Giroux. Freire menganalisis hubungan antara guru dan siswa dalam paradigma pedagogi yang menghasilkan penindasan terhadap siswa. Relasi kuasa yang asimetris antara guru dan siswa merupakan masalah utama dari paradigma ini. Sekolah sebagai lembaga pendidikan telah menerapkan paradigma pedagogi dengan “banking system” yang senantiasa membekali siswa dengan berbagai materi sekolah yang berasal dari kepentingan eksternal struktural siswa. Akibatnya siswa mengalami penindasan yang mengakibatkan ketergantungan pada guru dan membuat siswa kurang mandiri (Freire, 1976). Sementara itu, Giroux menyatakan bahwa paradigma pedagogi yang diterapkan di institusi pendidikan membuat siswa mengalami depresi, termasuk guru karena mereka lebih dituntut untuk bertanggung jawab secara vertikal ke sekolah. Tanggung jawab seperti ini tidak menjadikan siswa atau guru memiliki kreativitas melainkan mengalami depresi karena tekanan structural (Giroux, 2001).

Selain itu, Ayers (2003), yang menganalisis apa yang dilakukan oleh Neill (1960), menunjukkan bahwa Neill mendirikan sekolah berdasarkan prinsip “Freedom to Learn” yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berproses dalam pembelajaran dengan bimbingan guru. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2020 menyatakan bahwa Merdeka Belajar akan diterapkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu penting untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020a; 2020b).

Pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sejak masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo (periode 2019-2024), menghasilkan

kata kunci dalam pendidikan yang disebut “Merdeka Belajar”. Nadiem Makarim, dalam rapat gabungan dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, pada tahun 2019, menyatakan bahwa: “Ini yang Indonesia butuhkan di masa depan. Mohon maaf, dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal” (Tempo, 2019).

Kajian ini membahas aspek peluang dan tantangan program Merdeka Belajar di kalangan Guru Sekolah Menengah Atas di Karanganyar dalam merespon dan melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program Merdeka Belajar dimulai atas dorongan dan inisiatif Nadiem Makarim untuk menciptakan suasana belajar siswa yang membuat siswa bebas dari beban nilai atau nilai tertentu. Konsep Merdeka Belajar kemudian harus didahului dengan pemahaman dan kebebasan guru untuk mengkonversi kompetensi dasar kurikulum Merdeka Belajar sebelum mereka mengajar.

Program Merdeka Belajar merupakan strategi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi revolusi industri 4.0. Merdeka Belajar dipandang sebagai jembatan menuju sistem pendidikan masa depan yang lebih mengandalkan teknologi komunikasi yang harus dikuasai oleh siswa dan guru. Dalam hal ini guru dan siswa dituntut mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kajian ini menganalisis pergeseran paradigma dari model lama yang telah diterapkan menuju Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh guru sebagai aspek esensial. Lebih dari itu, fokus pada peluang dan tantangan yang dihadapi guru untuk mengetahui modal pengetahuan dan keterampilannya sebagai strategi menghadapi pergeseran paradigma belajar mengajar. Aspek pendekatan guru ini penting untuk dikembangkan sebagai model yang lebih baik untuk masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Nadiem Anwar Makarim, idenya merupakan inti dari strategi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Konsep Tut Wuri Handayani dari Ki Hadjar Dewantara menunjukkan posisi guru yang berada di belakang untuk mendukung dan memfasilitasi proses pemberdayaan siswa agar cerdas, kritis, dan kreatif untuk belajar mandiri. Kebijakan Merdeka Belajar kemudian menjadi perbincangan di kalangan pendidik. Mereka juga mempertanyakan apakah strategi Merdeka Belajar akan membawa perubahan pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini dan mungkin di masa yang akan datang.

Menurut Ki Priyo Dwiyarso anggota Majelis Luhur Taman Siswa menjelaskan bahwa Ki Hadi Sukitno adalah tangan kanan Ki Hadjar Dewantara semasa hidupnya, mengatakan bahwa yang dimaksud Ki Hadjar Dewantara adalah “Belajar Merdeka” bukan “Merdeka Belajar”. Artinya kemandirian dalam proses pembelajaran sehingga minat dan bakat siswa harus bebas berkembang seluas-luasnya. Ki Hadjar Dewantara memprioritaskan strategi pendidikan nasional ini dengan harapan agar setiap generasi tidak mudah tergerus oleh zaman (Medcom.id, 2020).

Ada empat pokok kebijakan pendidikan di bawah nama program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Nadiem, konsep kurikulum Merdeka Belajar perlu dimaknai pendidik sebagai konsep kebebasan berfikir siswa dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar mencakup empat program yang perlu dilaksanakan untuk setiap jenjang pendidikan. Studi ini berfokus pada jenjang SMA (Kompas.com, 2019).

Program pertama adalah pemberlakuan kembali Ujian Sekolah Berbasis Nasional 2020 untuk dilaksanakan sekolah. Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), siswa akan dievaluasi oleh guru, dan kelulusan ditentukan oleh sekolah.

Kompetensi atau penilaian siswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis sebagai ujian. Atau melalui penilaian yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan.

Program kedua, pada tahun 2020 menjadi tahun terakhir pelaksanaan Ujian Nasional. Selanjutnya, Ujian Nasional 2021 rencananya akan diganti dengan sistem baru berupa Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk menilai kemampuan literasi dengan tes bahasa, matematika (penalaran numerasi), dan pendidikan karakter.

Program ketiga terkait dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) akan dibuat dengan model administrasi sederhana dengan tiga komponen inti dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Tujuan penyederhanaan RPP adalah untuk mengurangi beban administratif pada guru yang perlu lebih memperhatikan kebutuhan akademik siswanya.

Program keempat, sistem penerimaan siswa baru berdasarkan rencana zonasi, masih berlaku dan melalui kuota jalur prestasi yang diperbanyak. Kuota zonasi akan diubah dari zonasi 80%, perpindahan 5%, dan prestasi 15% menjadi zonasi 50%, afirmasi untuk Kartu Indonesia Pintar 15%, perpindahan 5%, sisanya untuk prestasi 30%.

Empat perubahan mendasar dalam kurikulum “Merdeka Belajar” tersebut tentunya berdampak pada perubahan pola dan karakteristik pendidikan Indonesia. Khususnya perbedaan aspek pembelajaran guru dalam menyiapkan sumber daya siswa untuk menghadapi uji Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Berdasarkan ketiga aspek kompetensi tersebut maka diperlukan kompetensi guru yang memadai untuk mewujudkan pembelajaran berbasis “Merdeka Belajar” untuk mencapai ketiga kompetensi fundamental tersebut, termasuk dalam menghadapi persaingan global.

Fenomena globalisasi yang bergerak melalui ranah bangsa, gagasan, keuangan, media, dan teknologi menyebabkan terjadinya proses pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan (Apadurai, 1996). Ranah teknologi, media, dan gagasan merupakan ranah penting yang telah mengkondisikan berbagai perubahan pada banyak gagasan di seluruh dunia. Ranah gagasan paling banyak dipengaruhi melalui dunia pendidikan.

Al’Abr (2011) menelaah kebijakan di negara berkembang telah berubah dalam mengantisipasi globalisasi. Nadiem Makarim mengantisipasi kecepatan perubahan akibat globalisasi dengan melakukan perubahan kebijakan pendidikan. Aspek peluang dan tantangan yang dihadapi guru dan siswa belum diperhitungkan dalam penelitian Al’Abr. Ia lebih fokus pada aspek literasi informasi dan pendidikan komputer. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar merupakan ranah baru di Indonesia yang perlu dikaji untuk menganalisis kondisi guru dan siswa dalam menghadapinya karena ranah ini tidak lepas dari berbagai masalah.

Perubahan kebijakan pendidikan yang sarat masalah menurut Hasbullah (2015) terkait dengan beberapa faktor, yaitu: 1) Lemahnya penguasaan konseptual dan substansial pembuat kebijakan tentang pengetahuan, informasi, penjelasan, dan berbagai masalah pendidikan. 2) Para pembuat kebijakan seringkali menggunakan berbagai sumber referensi, sehingga membuat kebijakan mereka menjadi tidak jelas. 3) Informasi mengenai arah kebijakan seringkali minim atau bahkan terlalu banyak sehingga membuat isi kebijakan pendidikan menjadi tidak jelas. Ketiga faktor tersebut membuat kurang lancar dan tidak mudah dipahami oleh penerima kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

Kebijakan Merdeka Belajar, jika ditelusuri berdasarkan filosofinya, akan berkaitan dengan gagasan Alexander Sutherland Neill. Ayers (2003) mengamati bahwa Neill memiliki keyakinan yang kuat ketika mendirikan Summerhill School pada tahun 1921 di Leiston, Suffolk, London. Neill menerapkan pendidikan tanpa paksaan dan tekanan kepada murid-muridnya. Neill (1960) menyatakan bahwa di sekolah, ia mendirikan siswa belajar tanpa paksaan dari

gurunya dan tanpa tekanan dari tugas sekolah karena ia menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memperoleh pengetahuan. Ide ini didasarkan pada ideologi liberalnya.

Hubungan antara guru dan siswa dalam proses Merdeka Belajar berdasarkan model Neill adalah setara, bahkan dengan tanggung jawab yang sama. Sekolah dijalankan secara demokratis. Guru memiliki otoritas, namun otoritas tersebut tidak difungsikan oleh guru sebagai instrumen yang membebani siswa karena siswa memaknai pembelajaran sebagai hak secara berdaulat. Secara filosofis gagasan ini berakar pada konsep liberalisme, kemudian pendidikan menjadi instrumen untuk membangun kesadaran akan hak-hak warga negara.

Fungsi sekolah dengan model klasik dalam pandangan Neill adalah bahwa siswa harus duduk dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru dan mempelajari berbagai bidang pengetahuan yang diberikan guru kepada siswa adalah tidak berguna dan model yang buruk. Rogers (1969) dalam bukunya "Freedom to Learn" menyatakan dengan tegas bahwa sekolah pada umumnya masih sangat tradisional, konservatif, birokratis, bahkan cenderung menolak perubahan. Menurutnya, salah satu cara menyelamatkan generasi dari model pendidikan ini adalah "Merdeka Belajar".

Paulo Freire dan muridnya, Augusto Boal, telah mencetuskan ide-ide seperti Merdeka Belajar sebagai kritik terhadap model pembelajaran klasik seperti yang dikritik oleh Neill sebagai model "banking system". Siswa hanya diisi dengan ilmu yang berasal dari guru, sedangkan siswa tidak aktif. Keadaan ini telah melahirkan siswa yang tertekan secara ilmiah sehingga solusinya adalah proses pembelajaran yang membebaskan siswa (Boal, 2006).

Boal kemudian menggunakan gagasan Freire dalam pendidikan di bidang teater. Dalam hal itu, ia berhasil membangkitkan kesadaran bahwa aktor-aktor di teater hanya menguasai, tetapi penonton hanya menontonnya saja. Boal kemudian mengubah pola teater klasik dengan membangun interaksi antara aktor di atas panggung dan penonton untuk pendidikan di negara berkembang yang rakyatnya tertindas oleh sistem kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonton kemudian berperan aktif dalam berinteraksi dengan para aktor, yang menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama antara aktor dan penonton (Boal, 2006).

Giroux (2001), yang juga murid pemikiran Paulo Freire, menulis artikel berjudul "Pedagogy of the Depressed", yang membahas bahwa pendidikan tidak hanya tentang pemberdayaan masyarakat, praktik kebebasan, tetapi ia juga menganalisis model pendidikan yang memudahkan imajinasi. Oleh karena itu, pendidikan dengan model yang ada juga memiliki sisi yang membuat seseorang mengalami depresi.

Giroux kemudian menekankan bahwa dalam dunia pendidikan, model pedagogi yang mengajarkan teks sering dipraktikkan, hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas seperti absensi siswa dan guru, dan standar objektif berdasarkan nilai kuantitatif atau peringkat. Menurut Giroux, semua itu dirancang untuk melemahkan kemungkinan siswa menjadi pemikir kritis karena dengan semua model tersebut, siswa mengalami depresi (Giroux, 2001). Oleh karena itu siswa perlu memperoleh kebebasan agar tidak tertekan oleh otoritas pendidikan.

Aronowitz & Giroux (2003) telah memetakan tiga paradigma dalam pendidikan: konservatif, liberal, dan kritis. Paradigma konservatif memandang perubahan sosial sebagai proses alamiah sehingga tidak perlu diperjuangkan. Sifat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa ketimpangan dalam relasi sosial merupakan kondisi alamiah. Pandangan ini mengasumsikan bahwa mereka yang menderita secara sosial ekonomi, seperti orang miskin, tidak berpendidikan sehingga buta huruf, orang yang terpinggirkan dalam proses sosial ekonomi adalah akibat kesalahannya sendiri. Banyak orang yang miskin saat bekerja keras telah menunjukkan kesuksesan.

Sedangkan paradigma pendidikan liberal memiliki perspektif bahwa mungkin terdapat permasalahan dalam struktur sosial. Meski demikian, mereka yang bisa mendapatkan pendidikan yang baik tidak terkait dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Meski begitu, kaum liberal memberikan porsi kepada negara yang bertanggung jawab atas pendidikan warganya. Sehingga selalu berusaha menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Logika liberal ini sering berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah pendidikan, tetapi seringkali dangkal, sehingga struktur ketidaksetaraan tetap ada (Aronowitz & Giroux, 2003).

Berbeda dengan dua paradigma sebelumnya, paradigma pendidikan kritis memiliki orientasi untuk membangun kemampuan kritis secara reflektif. Mereka kemudian menggunakan kemampuan ini untuk menanggapi sistem dan struktur sosial yang timpang dan bertahan lama. Pendidikan kritis ini penting karena mendidik siswa untuk menjadi agen perubahan (Aronowitz & Giroux, 2003). Model Merdeka Belajar tampaknya mengandung paradigma kritis, meskipun tidak jelas apakah orientasi yang dimaksud Nadiem Makarim ke arah itu atau tidak. Prinsip dasar kemandirian adalah salah satu ciri pentingnya.

Konsep Merdeka Belajar ini mirip dengan konsep andragogi Knowles, meskipun Nadiem tidak menyebut andragogi dalam pidatonya. Knowles menggunakan konsep andragogi untuk membangun teori pembelajaran orang dewasa yang komprehensif yang bertumpu pada karakteristik peserta didik dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat empat asumsi tentang karakteristik peserta didik dewasa (andragogi) yang berbeda dengan asumsi peserta didik anak (pedagogi). Pada tahun 1984, Knowles menambahkan asumsi ke-5. Keseluruhan gagasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep diri, yaitu ketika seseorang menjadi dewasa, konsep dirinya bergerak dari satu kepribadian bergantung menjadi seseorang yang menjadi manusia yang mengarahkan dirinya sendiri.
- 2) Pengalaman pelajar dewasa, yaitu ketika seseorang menjadi dewasa, dia mengumpulkan sumber pengalaman yang semakin bertambah yang menjadi sumber belajar yang meningkat.
- 3) Kesiapan untuk belajar yaitu pada saat seseorang dewasa maka kesiapannya untuk belajar semakin berorientasi pada pengembangan peran sosialnya.
- 4) Orientasi untuk belajar, yaitu ketika seseorang menjadi dewasa, perspektif waktunya berubah dari penerapan ilmu yang tertunda menjadi penerapan langsung. Akibatnya, orientasinya terhadap pembelajaran bergeser dari satu fokus pada subjek menjadi berpusat pada masalah.
- 5) Motivasi belajar yaitu ketika seseorang sudah dewasa maka motivasi belajarnya bersifat internal (Knowles 1984, p. 12).

Menurut Neill, Freire, Boal, Giroux, dan Knowles, dapat dianggap bahwa itu hanya cocok untuk anak-anak yang belum dewasa. Akibatnya berdasarkan hasil analisis mereka bahwa pendidikan tidak membuat siswa menjadi kreatif. Relasi kuasa asimetris antara guru dan siswa sering dijaga, bahkan ada makna istilah "guru killer". Dengan cara ini, pendidikan dengan model ini mereproduksi nilai "siswa patuh" seperti dalam pola hubungan social yang feodalistik. Akibatnya, siswa menjadi tidak kreatif dan tidak berpikir kritis serta berada dalam kondisi tertekan dan depresi.

Berdasarkan teori yang memberikan kritik terhadap pedagogi (Neill, Freire, Boal, dan Giroux) dan teori andragogi oleh Knowles (1980; 1984) tentang kebebasan dalam belajar, kajian ini menganalisis tantangan dan peluang praktik pendidikan Merdeka Belajar. Kajian ini penting

dilakukan untuk memahami strategi yang dihadapi guru dalam mempraktikkan Merdeka Belajar berbasis teknologi komunikasi 4.0 sebagai jalan keluar dalam konteks sistem pendidikan yang berakar pada paradigma pedagogi.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut [Denzin & Lincoln \(2017\)](#), penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan empiris seperti pengalaman pribadi, pengalaman introspektif, kisah-kisah hidup, interaksi yang dibuat oleh subjek penelitian dengan masalah yang mereka hadapi, dan informasi yang menggambarkan rutinitas, peristiwa-peristiwa penting, dan Arti masalah yang terkait dengan tema penelitian dalam kehidupan individu. Berdasarkan pemahaman metode kualitatif menurut [Denzin & Lincoln \(2017\)](#), untuk memahami makna dalam konteks pengalaman guru dalam menghadapi program Merdeka Belajar, penelitian ini menganalisis secara interpretatif dengan memperhatikan aspek-aspek pengalaman (sebagai aspek historis) dan interaktif tindakan pada saat ini yang saling berhubungan. Selain itu, juga mencari informasi yang berkaitan dengan praktik sosial yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan Merdeka Belajar.

Wawancara dilakukan dengan tiga guru sosiologi dari Sekolah Menengah Atas Negeri dan dua guru Sekolah Menengah Atas Swasta. Mereka dipilih karena mereka memiliki pengalaman mengajar dan dikategorikan sebagai guru senior (dalam arti memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman) dan junior (memiliki setidaknya lima tahun pengalaman). Sebanyak tiga orang dipilih untuk guru senior dan sebanyak dua untuk guru junior. Sementara itu, tinjauan dokumen dilakukan dengan mencari publikasi yang terkait dengan program Merdeka Belajar. Dalam situasi pandemi Covid-19, metode yang digunakan adalah wawancara melalui panggilan melalui telepon dan aplikasi WhatsApp. Mereka diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pandangan guru tentang program Merdeka Belajar sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Wawancara mencakup masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam mengantisipasi program dan metode pengajaran daring karena program Merdeka Belajar berjalan dalam situasi pandemi.

Informasi tentang penggunaan teknologi komunikasi 4.0 dari guru dan siswa sangat penting untuk dijelajahi. Termasuk implikasi bagi guru untuk meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi 4.0 dalam pembelajaran mereka. Informasi dari para guru juga untuk menjelaskan bagaimana siswa menghadapi tantangan Merdeka Belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan sumber membaca yang tersedia dalam jurnal daring (dalam jaringan) dan bahan bacaan saat ini. Selain itu, informasi tentang bagaimana guru mengatur strategi Merdeka Belajar dengan siswa, yang sejauh ini sangat bergantung pada pengetahuan mereka pada guru.

Selain wawancara terkait dengan tantangan, kajian ini juga mencari informasi dalam bentuk peluang guru dan siswa dalam menghadapi pembelajaran mandiri. Informasi yang diperoleh tentang peluang ini adalah dalam bentuk tindakan guru untuk membangun peluang yang ada untuk mengatasi siswa yang telah bergantung pada guru. Informasi ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana guru memanfaatkan peluang untuk memecahkan masalah dalam beradaptasi dengan pola belajar lama ke pola Merdeka Belajar. Peluang-peluang ini dikaitkan dengan kemampuan siswa Sekolah Menengah Atas untuk mengakses sumber informasi dari *smartphone* atau komputer dengan jaringan internet.

Corbin & Strauss (2014) memperkenalkan pengkodean aksial sebagai fase kedua dari metode analisis data kualitatif komparatif konstan untuk tujuan pengembangan teori. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengkodean aksial, yaitu dengan membangun keterkaitan antar data. Metode ini merupakan teknik penelitian kualitatif yang melibatkan data yang telah dikaitkan dengan satu sama lain untuk mengungkapkan kode, kategori, dan sub-kategori yang merupakan suara informan dalam data yang dikumpulkan. Ini merupakan kerangka kerja metodologi kualitatif yang melibatkan perbandingan konstan dari tema yang muncul pada kumpulan data informan untuk membuat klaim teoritis tentang perilaku komunikatif seseorang. Strategi ini merupakan proses untuk secara induktif mencari keterkaitan antara data yang diperoleh dari observasi tentang perilaku, peristiwa, kegiatan, strategi, keadaan, makna, partisipasi, hubungan, kondisi, konsekuensi, dan pengaturan yang dilakukan oleh informan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Fase Transisi dalam Merdeka Belajar

Kemerdekaan dalam proses pembelajaran yang dimaksud oleh Nadiem Makarim memiliki kesamaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Neill (1960). Mereka sama-sama didasarkan pada perspektif bahwa pembelajaran adalah pilihan dan hak individual. Siswa dalam dunia sosial pendidikan memiliki keterbatasan struktural, seperti halnya guru. Kondisi ini menjadi semacam belenggu untuk kreativitas bagi siswa dan guru dalam konteks strukturalnya. Namun, ada prinsip bahwa setiap siswa memiliki hak untuk menjadi kreatif, cerdas, dan kritis sebagai hak untuk warga yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu Nadiem mengusung sekolah merdeka untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan kampus merdeka untuk perguruan tinggi.

Negara, melalui pendidik, seharusnya melayani hak-hak siswa-siswa ini. Merdeka Learning adalah perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan berdasarkan hak. Dalam perubahan ini, ada masa transisi yang penuh ketegangan bagi guru dan siswa. Memberikan layanan pendidikan bagi siswa untuk menentukan pilihan individual merupakan pemenuhan hak atas Merdeka Belajar. Ini berarti bahwa sekolah perlu segera memenuhi hak siswa untuk memilih apa yang ingin mereka peroleh dari dunia pendidikan.

Sejauh ini, siswa dapat menerima apa yang diberikan sekolah sebagai kewajiban yang harus mereka lakukan. Merdeka Belajar, dalam pandangan Neill, membangun kesadaran hak-hak siswa dan tanggung jawab mereka untuk menunjukkan karya kreatif, kritis, dan solutif untuk guru sebagai aparatur pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Nadiem Makarim tampaknya menjadi pengikut pemikiran Alexander Sutherland Neill, Freire, Boal, dan Giroux untuk menegakkan kebahagiaan dengan memberi kemerdekaan kepada siswa dan bahkan guru. Juga, hubungan yang merdeka dalam praktik pendidikan yang dilakukan oleh Neill mampu mengurangi penindasan dan depresi (tekanan mental) pada siswa dan guru (Freire, 1976; Giroux, 2001).

Guru di Sekolah Menengah Atas mungkin belum tentu siap menghadapi pergeseran paradigma radikal dalam pendidikan. Pola pendidikan Freire menyebut "banking system" telah menghegemoni pemikiran guru. Kondisi sebenarnya di antara guru masih menghadapi banyak masalah terkait dengan menyediakan layanan pendidikan kepada siswa dengan model Merdeka Belajar karena mereka terbiasa dengan pola lama. Selain itu, pandemi Covid-19, yang mengharuskan guru untuk menggunakan teknologi komunikasi 4.0, masih merupakan masalah yang serius.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukur (2014) di Kabupaten Nganjuk, misalnya, menunjukkan persentase rendah dari penggunaan laptop dalam proses belajar mengajar. Hasil survei 309 responden menunjukkan bahwa penggunaan laptop untuk proses pengajaran dan pembelajaran untuk guru SD adalah 0,97%, dan guru SMP adalah 3,24%, guru SMA adalah 7,12%, dan guru SMK adalah 10,3%. Selain itu, hasil survey juga menunjukkan bahwa mereka yang secara konsisten mengakses Internet masing-masing adalah 1,29% untuk guru SD, 2,91% untuk guru SMP, 8,74% untuk guru SMA, dan 9,71% untuk guru SMK. Sementara itu, untuk semua jenjang pendidikan, guru yang jarang mengakses Internet untuk guru SD adalah 17,15%, guru SMP adalah 10,36%, guru SMA adalah 14,24%, dan guru SMK adalah 12,94%.

Penelitian dilakukan oleh Syukur, meskipun dilakukan pada tahun 2014 dan di tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa penggunaan perangkat laptop dan akses internet oleh guru di Indonesia pada tahun 2020 dari tingkat administratif yang setara belum menunjukkan perubahan signifikan. Pendapatan guru untuk enam tahun mulai dari 2014 tidak meningkat secara signifikan. Sementara itu, kebutuhan keluarga selalu meningkat. Karenanya, kebutuhan untuk menyediakan laptop dan jaringan internet masih bukan persyaratan utama. Kebutuhan akan pemanfaatan laptop untuk guru cenderung meningkat karena mereka harus menggunakannya untuk mengajar.

Guru yang tidak memiliki jaringan internet di rumah harus pergi ke sekolah untuk menggunakan Internet. Menerapkan Merdeka Belajar, yang bertepatan dengan situasi pandemi, membuat siswa belajar dari rumah. Namun, beberapa guru masih pergi ke sekolah karena mereka tidak berlangganan internet di rumah. Saat menggunakan *smartphone*, sinyalnya sering tidak stabil. Guru pergi ke kantor untuk memanfaatkan internet sehingga pembelajaran jarak jauh masih dapat dilakukan tanpa gangguan sinyal (wawancara dengan Ibu Fitri, Guru Sosiologi, 2 April 2020).

Mungkin masih ada beberapa sekolah yang tidak menyediakan internet. Berdasarkan kondisi yang ada, Merdeka Belajar adalah tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan guru mengenai ketersediaan infrastruktur dan penguasaan guru terhadap teknologi 4.0. Paradigma bergeser dari model lama ke Merdeka Belajar dalam kondisi pandemi Covid-19 telah membantu mempercepat pelaksanaan program Merdeka Belajar. Ada perubahan dalam hubungan antara guru dan siswa, dari tatap muka di kelas menjadi secara virtual. Jika kuota internet membatasi siswa, mereka tidak perlu menghidupkan video, dan beberapa bahkan menggunakan fasilitas Google Classroom yang menggunakan perangkat lunak berbasis teks.

Dalam situasi pembelajaran dan pengajaran virtual, relasi kuasa antara guru dan siswa berubah. Proses pendidikan virtual yang telah dilakukan sejak Maret 2020 sekarang telah mengakibatkan pergeseran dalam pola relasi antara guru siswa yang semakin egaliter, meskipun masih asimetris. Masalah utama dalam relasi virtual ini adalah bahwa seorang guru tidak dapat memastikan apakah siswanya selalu di depan perangkat komputer atau tidak. Bahkan jika tidak, guru tidak dapat mengambil tindakan apa pun terhadap siswa. Ini adalah masalah baru yang melampaui ekspektasi program Merdeka Belajar.

Guru Sekolah Menengah Atas di Indonesia tidak mengerti apakah akan menggunakan paradigma konservatif, liberal atau kritis dalam proses belajar mengajar. Mereka mengikuti aturan pemerintah. Perubahan dari pola mengikuti pemerintah menuju Merdeka Belajar tidak terhindarkan mendorong para guru untuk mengetahui paradigma pengajaran yang digunakan, apakah itu didasarkan pada konservatif, liberal dan kritis. Namun, banyak guru menyatakan bahwa mereka tidak memahami paradigma ini karena sejauh ini, mereka hanya melakukan apa yang telah dipedomankan oleh sekolah, dan sekolah secara struktural tunduk pada pemerintah.

Situasi ini menunjukkan bahwa Merdeka Belajar juga memengaruhi guru agar lebih mandiri dan kreatif. Ini adalah modal penting bagi pemerintah karena tidak pernah memberikan penjelasan nyata kepada guru tentang jenis paradigma pendidikan. Pemerintah masih menggunakan logika untuk memberikan perintah kepada guru sebagai aparatus. Sementara itu, guru harus menginterpretasikan perintah untuk menerapkan Merdeka Belajar masih membutuhkan proses adaptasi, jadi sekarang adalah fase transisi yang sulit. Menurut Knowles (1980; 1984) dan Giroux (2001), sistem birokrasi model pendidikan pedagogi dalam praktiknya hanya membuat birokrasi lebih kuat, dan guru menjadi tergantung secara struktural atas perintah birokrasi, menghasilkan ketidakkreatifan dan depresi di antara guru-guru meskipun mereka memiliki potensi kreatif.

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung menjadi fase transisi bagi guru untuk menyesuaikan diri dengan program Merdeka Belajar. Masalahnya adalah mereka tidak tahu latar belakang paradigmatik model Merdeka Belajar. Ini dapat terjadi karena pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai, dan guru tidak mencari tahu latar belakang model Merdeka Belajar. Sejauh ini, model belajar mengajar di jenjang Sekolah Menengah Atas masih didasarkan pada model *Banking System*. Namun, ada sedikit modifikasi dalam bentuk persaingan antara siswa dan antar sekolah. Dalam kompetisi untuk bersaing, ini mencirikan paradigma liberal, meskipun masih setengah hati karena dominasi negara sangat kuat.

Kandungan model liberal di sekolah sejauh ini dapat dilihat dari proses peringkat untuk menentukan siswa mana yang dapat memasuki sekolah favorit di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ketika model zonasi sekolah dilakukan untuk membangun sekolah inklusif antar kelas, perlawanan terhadap zonasi cenderung berasal dari kelas sosial menengah dan atas yang merasa nyaman dengan model favoritisme sekolah tanpa zonasi. Kelas sosial menengah ke atas merasa bahwa mereka dapat membayar mahal dan memiliki fasilitas transportasi untuk memungkinkan anak-anak mereka untuk mendaftar di sekolah favorit mereka meskipun mereka tidak berada dalam zonasi mereka.

Sebagai kelas menengah, mereka merasa memiliki kekuatan ekonomi untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk mengikuti les untuk memiliki prestasi sehingga mereka dapat menentukan sekolah mana yang menjadi favorit mereka. Zonasi untuk mereka adalah hambatan, dan mereka tidak mau menyatukan anak-anak mereka bersama anak-anak dari kelas sosial yang lebih rendah. Sementara itu, kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah sulit menghadapi persaingan. Zonasi ini didasarkan pada paradigma kritis untuk membangun sekolah inklusif dalam hal kelas sosial. Jika situasi ini berlanjut, rencana sekolah inklusif, yang merupakan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk goal ke-4, akan sulit untuk dicapai.

Dimasukkannya zonasi untuk membangun inklusivitas merupakan bagian dari tujuan keempat SDGs yang telah disepakati secara internasional untuk menjadi bagian dari program Merdeka Belajar. Kebijakan zonasi lebih menguntungkan keluarga berkecukupan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit agar anak tersebut tidak bergaul dengan siswa dari keluarga kurang mampu. Prinsip zonasi menuju inklusivitas di kalangan siswa merupakan model penting bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai perbedaan kelas sosial ekonomi. Zonasi dengan demikian menjadi solusi dalam SDGs untuk membangun kebersamaan secara inklusif. Strategi ini tetap dilakukan meski berbagai bentuk perlawanan dari kalangan menengah ke atas secara sosial ekonomi. Dalam konteks Merdeka Belajar secara virtual pada masa pandemi Covid-19, banyak kendala yang dihadapi oleh keluarga kurang mampu terkait kepemilikan teknologi komunikasi virtual. Akibatnya, iklim persaingan yang setara tidak dapat terjadi karena adanya kesenjangan infrastruktur berbasis kelas sosial.

Kebanyakan guru tidak mengenal kombinasi paradigma liberal dan kritis Knowles (1980; 1984) dalam model Merdeka Belajar. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Ki Hadjar Dewantara menginspirasi ide Merdeka Belajar. Mereka tahu istilah "Tut Wuri Handayani" tetapi tidak mengerti artinya sebagai "Merdeka Belajar". Keadaan ini dapat terjadi karena guru lebih memosisikan diri sebagai aparatus dalam sistem pendidikan yang harus menjelaskan tugas-tugas yang hadir dari atas kepada dirinya sendiri, seperti dalam analisis Giroux (2001).

Guru senior dan junior yang diwawancarai menyatakan bahwa para guru belum sepenuhnya mengetahui makna Merdeka Belajar yang dicanangkan Nadiem. Mereka hanya memperkirakan makna dari berbagai informasi yang mereka peroleh dari media. Selain itu, sekolah juga merasakan situasi yang sama. Oleh karena itu semuanya harus berkoordinasi dengan sekolah. Dalam praktiknya, guru senior memiliki kemampuan yang lebih terbatas daripada junior untuk mengembangkan berbagai improvisasi dalam melaksanakan Merdeka Belajar (Wawancara dengan Ibu Sari, Guru Sosiologi, 5 April 2020). Situasi ini menegaskan temuan Giroux (2001) dan Freire (1970a; 1970b; 1973; 1976), yang pengetahuannya terabaikan karena birokrasi lebih menitikberatkan pada aspek administratif daripada paradigma pendidikan.

Paradigma pedagogi selama ini dipraktikkan oleh para guru tetapi tidak menyadarinya. Sedangkan ilmu andragogi belum dipahami. Dalam konteks itu, guru hanya berusaha berimprovisasi dalam mengimplementasikan model Merdeka Belajar tanpa mengetahui esensi paradigmanya. Sementara itu, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak ditindaklanjuti dengan naskah akademik yang mendukung paradigma Merdeka Belajar. Tampaknya para guru diharapkan untuk mengungkap latar belakang teoritis dari keputusan ini dalam praktiknya. Meski begitu, beban kerja administratif membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk memahami gagasan atau teori Ki Hadjar Dewantara, seperti karya Neill, Freire, Boal, Giroux, dan Knowles (1980; 1984).

Dari perspektif kritis, proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan siswa yang mampu berefleksi secara kritis untuk menghadapi dunia mereka di masa depan dan sekaligus mentransformasikannya. Diperlukan metodologi pendidikan dan pengajaran yang berbasis logika andragogi untuk menjalankan paradigma kritis. Knowles (1980) mengklasifikasikan metode menjadi dua bentuk pendekatan, yaitu pedagogi dan andragogi. Menurutnya, paradigma kritis lebih menggunakan pendekatan andragogi daripada pedagogi.

Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai warga negara yang berhak memiliki metode pendidikan, bukan lembaga pendidikan. Metodologi ini mengajarkan tentang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Ini menekankan pentingnya individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan posisi subjek (*subject position*) dalam konteks hak untuk memperoleh pengetahuan.

Sejauh ini, para guru telah menggunakan pendekatan pedagogi daripada andragogi. Begitu pula dengan sistem birokrasi yang berjalan di belakangnya lebih mendukung metode pedagogi. Metodologi andragogi membalikkan logika dalam proses belajar mengajar karena siswa adalah orang yang aktif dalam memperoleh pengalaman belajar, dan guru memfasilitasi, bukan menggurui. Nampaknya arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk memilih apa yang akan dipelajari, bukan lagi guru yang memberikannya, dan siswa menuruti pilihan guru.

Penyesuaian untuk melaksanakan Merdeka Belajar dihadapi oleh para guru dan siswa yang telah terhegemoni paradigma pedagogi. Tidak mudah melepaskan hegemoni ini selama birokrasi pendidikan tidak mendukung de-birokratisasi andragogi. Paradigma proses belajar mengajar andragogi memprioritaskan siswa untuk merencanakan arah pembelajaran, memilih

bahan ajar dan materi pelengkap yang berguna bagi mereka, serta mendiskusikan cara belajar terbaik dengan guru.

Saat memperoleh bahan ajar dan berdiskusi dengan guru, siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan apa yang mereka dapatkan dan manfaat pendidikan yang mereka rancang. Kondisi ini menuntut adanya perubahan posisi guru. Selama ini peran guru lebih banyak menggurui siswa di depan kelas. Siswa menjadi pendengar yang setia dan menuruti tugas guru. Paradigma andragogi menghilangkan posisi guru sebagai fasilitator dalam sistem pendidikan yang dirancang bersama siswa.

Metodologi pendidikan andragogi membangun berbagai pola komunikasi antara guru dan siswa. Guru memfasilitasi dan memberikan motivasi, berdialog dengan siswa dalam menentukan arah pembelajaran mengikuti keinginan siswa tetapi masih dalam koridor mata pelajaran yang relevan. Tujuan dari model Knowles Merdeka Belajar bukanlah pintar dalam arti mampu menjawab soal-soal ujian (dalam berbagai bentuk), tetapi cerdas dalam mengidentifikasi (membangun alur logis), mendeskripsikan (membangun proses penalaran), dan menganalisis (membangun penalaran dan daya kritis) tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan yang dihadapi siswa.

Strategi ini perlu dilakukan oleh guru dan siswa. Sebagai proses evaluasi kemajuan belajar siswa, guru dapat memberikan tes yang harus dijawab oleh siswa berdasarkan kemampuannya dalam hal identifikasi, penalaran, dan analisis untuk menghasilkan jawaban yang merupakan solusi dari masalah. Siswa dalam hal ini tidak dituntut untuk menghafal tetapi memiliki logika. Siswa tidak lagi seperti *Banking System*, seperti yang dianalisis oleh Freire (1976), tetapi dididik untuk menghadapi masalah.

Pendekatan proses Merdeka Belajar menuntut peserta didik memiliki pengetahuan kritis dan guru agar berdialog dalam berbagi ilmu. Dengan cara ini, siswa mengalami proses belajar emansipatoris dalam memperoleh pengetahuan. Untuk berproses ke arah tersebut, saat ini guru dan siswa berada dalam situasi transisi menuju pembelajaran Merdeka Belajar. Ada banyak tantangan dan peluang dalam prosesnya.

4.1.2. Peluang Merdeka Belajar dalam Situasi Pandemi

Mata pelajaran Sosiologi yang diajarkan di tingkat Sekolah Menengah Atas sebagai salah satu pelajaran utama dalam rumpun program studi Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki peluang bagi guru sosiologi. Sebagai ilmu sosial, ruang eksperimentasi Merdeka Belajar jauh lebih terbuka dibandingkan mata pelajaran lainnya. Selain itu juga membuka kesempatan bagi siswa dan guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sosial dan teknologi komunikasi dan informasi 4.0 yang tersedia. Pengalaman dan pengetahuan tentang teknologi 4.0 penting sebagai modal seorang guru menuju Merdeka Belajar.

Gagasan Merdeka Belajar baru memasuki masa sosialisasi, dan mulai diperkenalkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, namun seluruh dunia pendidikan harus menghadapi pandemi Covid-19. Pada Maret 2020 pemerintah menerapkan pola kerja dari rumah (*Work from Home*) sebagai metode pembelajaran untuk mengurangi penularan Covid-19. Para guru tiba-tiba harus menjalankan proses pendidikan secara *online* dari rumah masing-masing. Tiba-tiba tanpa bisa menghindarinya, mau tidak mau mereka melakukan Pembelajaran Jarak Jauh dengan menggunakan media teknologi.

Guru memberikan materi secara *online* melalui Google Meet, Google Classroom, Whatsapp dan ada juga guru yang membuat rekaman pengajaran dengan suara dan membaginya dengan siswa. Sekolah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan

teknologi guru atau belajar dari sesama guru dan ada pula yang belajar secara mandiri. Kondisi pandemi Covid-19 terasa seperti mempercepat proses Merdeka Belajar, namun hanya dari segi teknologi komunikasi, bukan substansinya. Guru dan siswa masih belum mengetahui pemahaman tentang paradigma Merdeka Belajar, sehingga masih mencari tahu apa artinya. Sedangkan sistem birokrasi yang ada belum mendukung proses Merdeka Belajar, karena masih menggunakan birokrasi pedagogi, bukan andragogi. Situasi ini sebagaimana dijelaskan oleh Giroux (2020) menunjukkan adanya keterbelakangan birokrasi dengan kondisi yang ada.

Merdeka Belajar yang desain awalnya diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2020, bertepatan dengan pandemic Covid-19. Akhirnya, suka atau tidak suka, model Merdeka Belajar mengikuti pola pengajaran *online*. Kondisi pandemi yang tiba-tiba muncul menjadi peluang bagi para guru untuk menyiapkan model Merdeka Belajar yang berorientasi pada aktivitas siswa. Hal ini tidak hanya dialami oleh guru SMA di Karanganyar tetapi juga guru di seluruh Indonesia.

Guru masih tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam paradigma andragogi (andra = dewasa, dan gogi = pendidikan). Hal ini disebabkan keterbelakangan paradigmatis yang sudah lama diabaikan oleh dunia pendidikan di Indonesia yang tidak serta merta berubah dari pedagogi ke andragogi bagi siswa SMA. Oleh karena itu, pemikiran Knowles masih relevan untuk menjelaskan kondisi Indonesia dalam melakukan perubahan paradigma pendidikan.

Pandangan yang digagas oleh Knowles (1984) tentang paradigma andragogi semestinya menjadi dokumen pedoman guru tentang Merdeka Belajar, tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukannya. Situasi ini membuat para guru semakin banyak melakukan cara untuk mengembangkan dan menerapkan kepada siswanya. Sebagian besar guru mengartikan “Merdeka” sebagai kebebasan siswa dan guru untuk mengembangkan strategi belajar mengajar. Para guru tidak bertindak terlalu jauh dengan improvisasi, tetapi tidak disusun berdasarkan prinsip andragogi, seperti yang dikemukakan oleh Knowles.

Sebelum Covid-19 menyebar luas, kebijakan Merdeka Belajar telah digunakan oleh para guru untuk menyusun format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan oleh para guru. Mereka mendengarkan sosialisasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari berbagai media sejak 2019. Beberapa guru mendapat penjelasan singkat dari kepala sekolah. Belum ada sosialisasi atau arahan dari pemerintah yang menjelaskan bagaimana melaksanakan Merdeka Belajar. Selain itu juga tidak diikuti dengan pemberian modul bimbingan bagi guru.

Mereka hanya menerima teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan Merdeka Belajar. Guru, terutama guru yang usianya sudah tidak muda lagi, masih bingung bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Selama ini mereka lebih terbiasa dengan paradigma pedagogi dalam mengajar. Para guru menyatakan telah beberapa kali mencari informasi dari internet terkait penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari

dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019).

Dalam masa transisi menuju Merdeka Belajar, beberapa guru merasa sangat diuntungkan dengan rekomendasi kebijakan terkait pandemi. Artinya, situasi pandemi merupakan peluang untuk proses Merdeka Belajar. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan strategi Merdeka Belajar namun tetap mengikuti program yang telah dicanangkan. Menurut Mur, Guru Sosiologi SMA di Karanganyar, dengan Covid-19, konsep Merdeka Belajar bisa diterapkan oleh guru. Bersama guru lainnya, barulah menentukan metode pengajaran bagi siswa, termasuk penggunaan media *online* yang dapat diterima siswa dengan baik.

Program kursus gratis Microsoft Office 365 memungkinkan mereka menggunakannya untuk pengajaran dan pembelajaran *online* dengan siswa. Sekolah memberikan pelatihan kepada para guru, dan pelatihan ini merupakan kesempatan untuk menjalankan Merdeka Belajar selama pandemi ini (Wawancara dengan Ibu Mur, Guru Sosiologi, 2-6 April 2020, melalui komunikasi *online*). Meskipun mereka dapat melakukan pelibatan guru dan siswa melalui penggunaan teknologi media *online* untuk proses belajar mengajar, namun mereka belum memasuki paradigma andragogi dan kritis seperti desain Merdeka Belajar dalam perspektif teoritis dari Knowles (1984), Freire (1973), atau Giroux (2001; 2020).

Penjelasan guru tersebut menunjukkan bahwa yang mereka lakukan lebih bersifat teknis terkait fasilitas multimedia dalam proses Merdeka Belajar, bukan aspek paradigmanya. Situasi ini menunjukkan bahwa mereka belum memahami makna paradigmatis Merdeka Belajar. Siswa pun tidak mengetahuinya, dan pada akhirnya siswa cenderung menunggu perintah guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik guru maupun siswa belum memiliki kesiapan dan pemahaman tentang paradigma andragogi dan masih terpacu pada paradigma pedagogi yang dikritisi oleh Neill, Freire, Giroux dan Knowles puluhan tahun yang lalu.

Dalam praktiknya, metode Merdeka Belajar dalam situasi pandemi mendorong para guru untuk bereksperimen secara berbeda dengan guru lainnya. Keadaan ini menjadi peluang bagi guru untuk menciptakan kreativitas belajar mengajar pada mata pelajaran Sosiologi bagi siswa. Guru juga berusaha memberikan kebebasan kepada siswanya untuk berkreasi dalam melakukan kegiatan, baik secara individu maupun kelompok. Menarik jika kita menganggapnya sebagai peluang karena setiap guru dapat berinovasi mengembangkan teknik alternatif yang memudahkan siswa dalam memahaminya.

Hal tersebut dialami oleh seorang guru bernama Fitri. Ia menerapkan pembelajaran *online* melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Ia memberikan materi kepada siswanya untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum ia menjelaskan isi materi tersebut. Setelah siswa memiliki waktu untuk mempelajari materi, mereka mendiskusikan materi tersebut secara *online* dengan siswa mereka pada jadwal pengajaran mereka. Ia merasa cara ini memudahkan siswa dan mengurangi ketergantungan mereka pada guru. Siswa juga mendapatkan pengalaman mandiri untuk mempelajari materi dan berdiskusi di kelas *online* (Wawancara dengan Bu Fitri, Guru Sosiologi, 2-6 April 2020, melalui komunikasi *online*).

Peluang lain dari Merdeka Belajar dengan pembelajaran jarak jauh bagi guru adalah siswa dapat menggali dan menimba ilmu tidak hanya dari penjelasan guru di sekolah dan materi buku yang selama ini dijadikan pedoman. Siswa mendapatkan tambahan dari berbagai referensi lain yang dapat diunduh dari internet berupa artikel, tulisan guru lainnya yang dipublikasikan di internet, bahkan dari YouTube sehingga siswa dapat memperoleh sumber lain yang dapat memberikan banyak tambahan ilmu bagi siswa.

Merdeka Belajar juga memberikan kesempatan lain bagi para guru untuk tidak selalu berada di dalam kelas. Siswa dapat belajar di luar sekolah untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Guru dapat mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekolah atau mengunjungi suatu tempat di luar sekolah untuk melakukan observasi sebagai metode penelitian sosiologi. Siswa kemudian membuat laporan tentang apa yang mereka ikuti dari lingkungan sosial mereka untuk mereka presentasikan. Metode ini memberikan tambahan pengetahuan kepada siswa tentang observasi.

Situasi pandemi dengan pembelajaran jarak jauh memungkinkan guru dan siswa melakukan pembiasaan untuk berubah dari paradigma pedagogis ke andragogi. Pada tahap ini, institusi sekolah perlu mengikuti mekanisme birokrasi dari pedagogi hingga andragogi sehingga institusi pendidikan menjadi sistem pendukung belajar siswa yang merdeka. Kemerdekaan ini penting untuk memperoleh kemerdekaan intelektual agar siswa menjadi lebih mandiri dalam menghadapi masa depannya.

Berbagai hal yang telah dilakukan oleh para guru yang telah berimprovisasi dalam Merdeka Belajar perlu dihormati. Namun, mereka tidak disertai dengan dokumen yang membimbing mereka dengan logika pedagogi. Kemampuan guru junior dan senior pada fase ini cenderung mengarah pada proses pendewasaan, yang perlu didukung oleh birokrasi pendidikan yang lebih membebaskan pendidik dari beban administratif yang selama ini membuat mereka tertekan sehingga mengganggu kualitas pendidikan kepada siswa.

4.1.3. Strategi Guru Melawan Ketergantungan Siswa pada Guru

Kajian ini menemukan bahwa banyak guru yang masih bingung dengan model Merdeka Belajar, namun dalam kebingungan itu, mereka terus berusaha menyelesaikannya sebagai sebuah tantangan. Tantangan terberat guru adalah ketergantungan siswa pada apa yang dikatakan guru di depan kelas daripada mendiskusikan bahan ajar. Kurikulum Merdeka Belajar lebih menitikberatkan pada relasi antara guru dan siswa, yang tidak menciptakan ketergantungan melainkan kemandirian siswa. Ini adalah prinsip yang telah dipraktikkan Neill (1960) puluhan tahun yang lalu tetapi harus dihadapi oleh para guru SMA di Karanganyar pada paruh pertama abad ke-21 dengan siswa dari generasi milenial yang terbiasa dengan teknologi komunikasi pintar.

Pak Ari, seorang guru, memahami kebijakan Merdeka Belajar sebagai suatu proses belajar-mengajar, baik di dalam kelas, di luar, maupun melalui cara-cara kreatif lainnya. Ini adalah strategi yang dia gunakan untuk menciptakan kebiasaan baru agar siswa lebih aktif dan melepaskan diri dari ketergantungan guru. Strategi ini penting sebagai model yang dapat ditiru oleh guru lain di sekolah lain. Dalam usaha mengurangi ketergantungan pada guru, ia mengajar siswa di luar kelas, misalnya dengan membawa siswa ke pasar, kota, dan mengamati pedagang kaki lima. Kesempatan ini dimanfaatkan guru dan siswa untuk berdiskusi tentang perspektif sosiologis tentang situasi sosial yang mereka amati.

Menurutnya, strategi ini memang didanai oleh para siswa dan guru. Kendala yang dihadapinya adalah tidak semua siswa dari keluarga mampu secara ekonomi, namun hal tersebut berdampak pada keterlibatan siswa dalam diskusi. Untuk mengatasi masalah

keuangan, Pak Ari mengatasinya dengan meminta siswa mengamati fenomena yang sama di sekitar sekolah dan rumahnya, kemudian mereka membuat laporan dari hasil pengamatannya. Strategi andragogi ini membuat siswa lebih mandiri, meskipun sulit bagi mereka untuk memulai.

Seorang guru bernama Mur memahami Merdeka Belajar dalam arti proses pembelajaran dilakukan oleh siswa secara aktif. Pada kenyataannya siswa masih bergantung pada guru dan sekolah. Akibatnya, siswa menjadi sulit untuk aktif. Kemudian siswa juga bergantung pada bacaan dari guru. Siswa lebih memilih mendengarkan ceramah guru di depan kelas daripada membaca (Wawancara dengan Ibu Mur, Guru Sosiologi, 3 April 2020). Guru bernama Ari dan Mur menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada paradigma pendidikan pedagogi seperti yang dianalisis oleh Neill, Knowles, Freire, dan Giroux.

Sedangkan Merdeka Belajar, menurut seorang guru bernama Bu Fitri menuntut agar siswanya juga proaktif. Guru berperan sebagai penggerak dan fasilitator agar berjalan dengan baik, dan proses pembelajaran difasilitasi secara mandiri. Menurut Ibu Fitri, keberadaan Covid-19 tak pelak membuat siswa belajar dari rumah. Meski guru sudah memberikan materi kepada siswa, pada praktiknya tidak semua siswa membaca sehingga ketika ditanya soal, semacam tes yang hanya bisa menjawab beberapa siswa yang proaktif. Apa yang terjadi tidak sebanding dengan model Merdeka Belajar yang dilihat oleh Neill, Knowles, Freire, dan Giroux. Situasi ini bisa dimaklumi karena masih dalam kondisi transisi sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan tantangan.

Banyak dari mereka terkendala oleh alat komunikasi seperti *smartphone*, bahkan banyak yang tidak memiliki laptop dan internet. Beberapa siswa harus berbagi *smartphone* atau komputer dengan saudara mereka dan dipaksa untuk mengirimkan jawaban pada malam hari. Kondisi ini menyebabkan guru tidak memantau siswa untuk menggali materi karena masalah komunikasi. Sekolah bahkan memberikan pinjaman kepada siswa yang tidak memiliki *smartphone*. Guru kemudian membuat grup WhatsApp untuk berdiskusi dan mengingatkan siswa agar membaca materi yang telah dikirimkan.

Masalah komunikasi antara guru dan siswa tidak hanya karena kurangnya kepemilikan *smartphone* tetapi juga terganggu oleh masalah sinyal yang tidak stabil di beberapa tempat di Karanganyar, dan guru juga mengalami hal yang sama. Akibatnya, proses pengajaran pun kerap terputus. Selain tatap muka virtual, beberapa guru juga mendapat pertanyaan dari WhatsApp jika siswa tidak dapat mendengar penjelasan dari guru. Bahkan ada guru yang mengalami masalah sinyal atau tidak memiliki Wi-Fi di rumah. Kondisi ini menyebabkan komunikasi digital menghambat proses belajar mengajar. Guru sering kali tidak dapat menanggapi pertanyaan siswa dengan cepat. Di sisi lain, tanggapan guru juga lamban dari siswa.

Ibu Fitri bahkan merekam suaranya untuk menjelaskan materi agar siswa mendengarkan karena membaca masih belum menjadi budaya apalagi belajar dari rumah. Guru tidak bisa memantaunya seperti di kelas. Ibu Fitri memilih merekam suara karena sebagian besar siswa keberatan menggunakan aplikasi yang menghabiskan banyak kuota siswa. Sebagai solusinya, pihak sekolah telah memberikan bantuan kuota bagi siswa keluarga tidak mampu. Alokasi komunikasi untuk beberapa keluarga siswa juga memberatkan karena beberapa anak melakukan Pembelajaran Jarak Jauh di keluarga tersebut.

Ibu Fitri dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar pernah mencoba memberikan ruang kepada siswa untuk berdiskusi tentang novel Etnografi. Diskusi tidak berjalan sesuai harapannya. Menurutnya, kesadaran membaca siswa masih kurang karena siswa bergantung pada penjelasan guru. Masalah ketergantungan siswa pada guru telah membuat sebagian besar

guru menggunakan pola lama dalam Merdeka Belajar, yaitu memberikan materi ajar kepada siswa, bukan siswa yang memilih materi untuk didiskusikan.

Seorang guru bernama Eri mengatakan bahwa kemampuan belajar mandiri siswa sangat kurang, sehingga mereka belum siap untuk Merdeka Belajar. Ketidapahaman siswa masih menyebabkan guru lebih dulu menjelaskan isi materi. Artinya, paradigma pedagogi selalu diterapkan pada peserta didik. Akibatnya, Merdeka Belajar masih membutuhkan waktu adaptasi bagi guru dan siswa untuk memahaminya.

Siswa yang kurang tertarik membaca saat diberikan materi dalam bentuk video animasi menghadapi kendala kuota internet. Bahkan siswa harus bergabung dengan temannya karena tidak memiliki kuota atau tinggal di rumah kerabat yang memiliki Wi-Fi. Hambatan lain bagi guru yang lebih senior juga penguasaan teknologi mereka. Masalah teknis dapat diatasi dengan mengikuti pelatihan teknis dalam menggunakan komputer dan *smartphone*. Untuk itu, guru perlu menyiapkan waktu ekstra untuk latihan dan menyiapkan materi secara *online*. Sedangkan guru perempuan yang sudah menikah seringkali mengalami beban ganda yaitu urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan. Anak-anak mereka juga pergi ke sekolah secara *online* selama pandemi, sehingga para guru yang merupakan ibu rumah tangga harus berurusan dengan anak-anak mereka yang terlalu banyak belajar jarak jauh.

Ibu Eri menyatakan bahwa dia hanya mengerti sedikit demi sedikit media dan edaran tentang Merdeka Belajar. Ia tidak mengetahui paradigma dasar karena ia hanya memahami bahwa ia hanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh guru lain yang mengikuti aturan sekolah. Dalam konteks Merdeka Belajar, sebagai guru sosiologi, ia mencoba mengajak siswanya untuk melakukan observasi di lingkungan sosialnya secara terbatas dan mengikuti protokol pandemi. Metode ini membutuhkan biaya tambahan dan lebih banyak waktu dalam beberapa kasus dibandingkan dengan kelas reguler.

Menurut para guru, untuk sekolah negeri yang memiliki laboratorium dengan teknologi lengkap di era 4.0, guru bisa mengajar dengan teknologi media yang canggih. Pelajaran siswa tidak selalu dalam bentuk teks karena guru dapat menampilkan gambar dan video sebagai materi yang lebih menarik bagi siswa. Meskipun guru memberikan materi yang berbeda dengan teks, namun tetap merupakan pilihan guru, bukan pilihan siswa. Artinya tersedianya perangkat teknologi 4.0 secara paradigmatis sebagai media pembelajaran, namun tidak mengikuti paradigma andragogi yang memisahkan siswa dan guru.

Tantangan yang harus dihadapi oleh para guru, siswa, dan birokrasi pendidikan adalah sulitnya memutus lingkaran hegemoni paradigma pedagogi *banking system* yang selama ini berjalan. Gagasan Merdeka Belajar memang penting. Meski demikian, masih perlu kesiapan birokrasi pendidikan yang perlu disederhanakan agar tidak menjadi beban bagi aparatus pendidikan atau peserta didik.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kurikulum Lama versus Baru (Merdeka Belajar)

Menurut Knowles (1984), ada empat prinsip penting dalam paradigma andragogi: 1) Partisipatif, artinya siswa sebagai orang dewasa perlu merencanakan dan mengevaluasi pengajaran mereka. 2) Pengalaman Dewasa, dimana siswa memiliki berbagai pengalaman positif dan negatif yang mereka alami dalam hidup, menjadi dasar dalam proses pembelajaran. 3) Relevansi dan Dampak, artinya siswa dewasa cenderung memilih mata pelajaran yang relevan dengan dirinya dan berdampak pada dirinya di kemudian hari sehingga kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang relevan merupakan aspek penting dalam Merdeka Belajar. 4) Berpusat pada Masalah, artinya pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa lebih

berorientasi pada menghadapi masalah dan proses pemecahannya, bukan berorientasi pada isi materi yang diberikan oleh guru.

Gambaran tentang berbagai strategi yang digunakan oleh guru SMA di Karanganyar menunjukkan bahwa asas andragogi Knowles (1984) ternyata tidak menjadi dasar dalam memutuskan untuk mengimprovisasi kebijakan Merdeka Belajar yang tidak disertai dengan instruksi yang jelas. Para guru berupaya membangun partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar berbasis masalah sosial yang menjadi fokus mata pelajaran Sosiologi. Sedangkan aspek kedua dan ketiga dari gagasan Knowles tidak diikuti sebagai tujuan pendidikan andragogi.

Menurut Giroux (2020), dunia pendidikan dalam tiga dekade terakhir, bahkan di Amerika Serikat dan Kanada, telah merosot drastis dalam kapasitasnya untuk mendidik generasi muda menjadi agen yang reflektif, kritis, dan terlibat secara sosial. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendidikan di bawah rezim neoliberal saat ini di negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat telah menjadi sasaran kekuatan berbahaya privatisasi dan kurikulum standar yang tidak masuk akal. Akibatnya, para guru mengalami kondisi perburuhan yang tidak dapat ditoleransi. Proses pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa memiliki potensi nyata untuk mendorong kesetaraan sosial dan mendukung demokrasi. Namun pendidikan di tingkat SMA hingga universitas kini meniru budaya bisnis yang dijalankan oleh para birokrat manajerial yang tergila-gila pada nilai pasar.

Masalah pedagogi dibahas secara kritis beberapa dekade yang lalu oleh Paulo Freire. Model pendidikan paradigma pedagogi (peda = anak, dan gogy = ajakan atau pendidikan) lebih tepat untuk mendidik seseorang pada masa kanak-kanak. Pendidikan bagi orang dewasa di Indonesia diperlakukan sama dengan anak-anak, sehingga model yang digunakan seperti *banking system* dan hafalan untuk mengukur hasil investasi. Artinya paradigma pedagogi telah ditinggalkan puluhan tahun jika dihitung dari tahun 1970, akan terjadi perubahan pada tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan birokrasi dan paradigmatis. Paradigma pedagogi telah membuat siswa tergantung dan pada saat yang sama, tertindas bahkan menjadi terbiasa dengan semua itu untuk menciptakan ketaatan tanpa kreativitas untuk mengembangkan diri (Freire, 1970a; Giroux, 2001; 2020).

Efek pedagogi yang diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia telah menjadi hegemoni dalam pola pengajaran konservatif (pedagogi). Akibatnya siswa tidak memiliki kemerdekaan. Mereka tidak dapat menentukan arah untuk diri mereka sendiri. Giroux, untuk mengatasi masalah tersebut, dengan mengacu pada Freire, mengusulkan pedagogi kritis sebagai alternatif dari pedagogi biasa untuk mendidik anak-anak di jenjang SMA agar siap memasuki tahap pendidikan yang mengedepankan prinsip andragogi (Giroux, 2020). Pengalaman dari strategi guru SMA di Karanganyar dengan mendorong siswanya aktif merupakan tantangan yang tidak mudah bagi guru. Mereka telah mengubah paradigma pedagogi yang telah mereka jalankan selama puluhan tahun dan siswa juga perlu menyesuaikan dengan paradigma andragogi. Strategi ini menjadi modal penting bagi guru untuk menerapkan paradigma andragogi di Merdeka Belajar.

Dalam peralihan dari kurikulum lama ke Merdeka Belajar, guru seringkali menghadapi situasi kelas yang lamban karena tidak memiliki kebiasaan membaca dan tingkat literasi yang rendah. Pada model pendidikan saat ini, tampaknya belum tercipta budaya membaca yang mandiri. Bahkan para guru pun mengaku tidak membaca buku baru karena pekerjaan administratif akibat birokrasi membuat pekerjaan teknis menumpuk.

Kuatnya birokratisasi pendidikan menunjukkan bahwa meskipun telah diupayakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan metode Merdeka Belajar, dalam

praktiknya tetap menggunakan pola lama, hanya dipindahkan dalam ruang maya. Giroux menyarankan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pendidik juga harus mempertimbangkan kembali peran penting yang mungkin mereka ambil dalam pendidikan umum dan pendidikan tinggi untuk menentang pendekatan korporatisasi dan birokratisasi sekolah dalam pengajaran sebagai bagian penting dari pendidikan (Giroux, 2020). Dalam konteks Indonesia, hal tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan karena sistem politik yang ada telah membuat guru tergantung dan tunduk pada struktur kekuasaan pendidikan saat ini.

Menurut Giroux (2020), pendidikan kritis sangat penting karena bagian dari situasi stagnan didasarkan pada asumsi bahwa pendidik dengan keras menolak setiap upaya dari pemikiran pendidikan liberal untuk mengurangi peran mereka di sekolah menjadi teknisi atau pekerja perusahaan. Merdeka Belajar merupakan pemikiran liberal dari Nadiem Makarim, diikuti oleh guru dan birokrasi pendidikan. Kondisi birokrasi yang ada saat ini memang menantang untuk mengubah dirinya keluar dari zona nyaman selama ini.

Berdasarkan logika kritis yang dikembangkan oleh Giroux, Freire, Neill, dan Knowles, tampak jelas bahwa pendidik perlu lebih progresif dengan mendefinisikan kembali peran mereka sebagai intelektual publik yang terlibat yang mampu mengajar bahasa kritis kepada siswa. Pengalaman mereka dalam menerapkan strategi menuju Merdeka Belajar merupakan pengalaman penting yang masih perlu dibekali dengan aspek teoritis. Pengalaman yang diupayakan oleh guru sosiologi SMA di Karanganyar untuk melakukan observasi langsung pada dunia sosial sosiologi yang nyata menjadi penting bagi siswa dan guru. Pengalaman ini merupakan prasyarat untuk perubahan dan meletakkan dasar pemikiran strategis dari pendidikan kritis. Dalam konteks Merdeka Belajar, guru dan birokrasi pendidikan perlu mendefinisikan tujuan, makna, dan politik pendidikan dengan menunjukkan bahwa pendidik kritis memiliki pengetahuan dasar dalam praktik pendidikan yang kritis sehingga guru dan siswa sama-sama menjadi agen sosial yang memiliki tanggung jawab kewarganegaraan. Merdeka Belajar adalah kesempatan untuk pendidikan yang kritis dan mandiri.

5. Kesimpulan

Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem Makarim merupakan gagasan penting untuk mengubah paradigma pendidikan Indonesia. Namun, para guru belum memahami sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait program Merdeka Belajar. Selain itu, belum ada sosialisasi terkait paradigma metode Merdeka Belajar, dan sistem birokrasi yang ada masih menunjukkan keengganan untuk berubah terkait dengan model Merdeka Belajar. Kajian ini menyimpulkan bahwa birokrasi pendidikan masih terhegemoni dengan paradigma pedagogi dan kesulitan menyesuaikan dengan paradigma andragogi.

Selain itu, kompetensi guru yang selama ini dikuasai sistem birokrasi secara struktural membuat mereka terseret dalam rutinitas birokrasi pendidikan sehingga terhegemoni oleh paradigma pedagogi. Guru junior cenderung lebih leluasa menghadapi tantangan dan memanfaatkan kondisi pandemi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi 4.0. Mereka lebih mampu mengimprovisasi program Merdeka Belajar. Sedangkan guru senior membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk mempelajari cara mengoperasikan komputer untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sekolah juga menyediakan fasilitas untuk memberikan kursus singkat kepada guru senior yang tidak pernah menggunakan komputer.

Selama ini guru hanya menjalankan perintah sebagai aparatus pendidikan secara struktural. Kondisi ini berdampak pada karakter guru yang kehilangan kemandirian berkreasi, padahal memiliki potensi untuk berkreasi. Sistem birokrasi pendidikan yang ada membuatnya hanyut dalam rutinitas birokrasi pendidikan. Dalam konteks Merdeka Belajar, guru

membutuhkan waktu transisi untuk mempersiapkannya karena keluar dari hegemoni pedagogi menuju paradigma andragogi bukanlah hal yang mudah dilakukan, selama birokrasi tidak mengikutinya.

Kompetensi guru dalam birokrasi pedagogi selama ini telah membelenggu mereka ke dalam ruang yang penuh dengan batasan dan menyebabkan mereka ikut dengan struktur yang ada saat ini secara struktural. Akibatnya, beban administratif membuat para guru sibuk dengan hal-hal tersebut, yang terus menumpuk sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan mengajar. Ini merupakan kerugian investasi di bidang pendidikan karena para guru yang seharusnya berperan dalam memperkuat modal negara disibukkan dengan urusan manajerial. Selama ini birokrasi pedagogi sistem pendidikan belum sesuai untuk mendukung proses Merdeka Belajar.

Dalam situasi seperti ini, birokrasi perlu melakukan perubahan untuk memiliki paradigma andragogi. Tanpa itu, peluang Merdeka Belajar cenderung terhambat. Kemerdekaan dalam belajar tidak hanya didasarkan pada individu siswa atau guru. Namun demikian juga terkait dengan dunia pendidikan, termasuk sistem birokrasi, sistem administrasi, dan pembiasaan orang tua siswa terhadap Merdeka Belajar. Merdeka Belajar perlu dicapai, dialami, dan bergerak dalam mengembangkan pengalaman siswa, guru, dan orang tua, termasuk birokrasi pendidikan.

Permasalahan yang tampaknya menjadi tantangan bagi proses Merdeka Belajar adalah sebagian besar guru yang terdidik dalam pengalaman tidak merdeka, sehingga hegemoni masih mendominasi pemikiran dan tindakannya. Alhasil, cara yang mereka lakukan juga dilakukan kepada siswanya. Oleh karena itu, diperlukan pembiasaan sebagai transisi menuju Merdeka Belajar, dan banyak peluang yang dapat dilakukan untuk mencapai tingkat kemerdekaan yang tepat.

Mengandalkan guru dan siswa saja untuk menjalankan program Merdeka Belajar dapat dikatakan merupakan kesalahan mendasar karena definisi kebijakan tidak didasarkan pada landasan paradigmatis yang jelas dan mudah dipahami. Guru harus merdeka dahulu dalam hal kesejahteraan. Birokrasi juga perlu membebaskan aparatus pendidikan agar bebas dan sejahtera dalam mengelola sistem administrasi. Aparatus pendidikan, guru, serta siswa tertekan dengan berbagai beban, dalam pandangan Giroux. Oleh karena itu, Merdeka Belajar adalah membebaskan guru, siswa, aparatus pendidikan, dan birokrasi untuk menyelenggarakan pendidikan Merdeka Belajar yang memberikan kesejahteraan akademik bagi siswanya.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

Al'Abr, K. (2011). The Impact of Globalization on Education Policy of Developing Countries: Oman as an Example. *Literacy Information and Computer Education Journal*, 2(4), 491-502. <https://doi.org/10.20533/licej.2040.2589.2011.0068>

- Apadurai, A. (1996). *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, United States: University of Minnesota Press.
- Aronowitz, S., & Giroux, H. A. (2003). *Education Under Siege: The Conservative, Liberal and Radical Debate over Schooling* (1st ed.). London, United Kingdom: Routledge.
- Ayers, W. (2003). *On the Side of the Child: Summerhill Revisited*. (H. Kohl, Ed.). New York, United States: Teachers College Press.
- Boal, A. (2006). *The Aesthetics of the Oppressed* (1st ed.). London, United Kingdom: Routledge.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2014). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (Fourth ed.). Thousand Oaks, United States: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth ed.). Thousand Oaks, United States: SAGE Publications.
- Freire, P. (1970a). *Pedagogy of the oppressed*. New York, United States: Continuum.
- Freire, P. (1970b). *Cultural action for freedom*. Cambridge, United States: Harvard Educational Review.
- Freire, P. (1973). *Education for critical consciousness*. New York, United States: Seabury Press.
- Freire, P. (1976). *Education, the practice of freedom* (illustrated edition). London, United Kingdom: Writers and Readers Publishing Cooperative.
- Giroux, H. A. (2001). Pedagogy of the Depressed: Beyond the New Politics of Cynicism. *College Literature*, 28(3), 1-32. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25112600>
- Giroux, H. A. (2020). *On Critical Pedagogy*. London, United Kingdom: Bloomsbury.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Depok, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019, November 29). Pidato Mendikbud Nadiem Makarim pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional 2019. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato-mendikbud-nadiem-makarim-pada-upacara-bendera-peringatan-hari-guru-nasional-2019>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020a, February 18). Merdeka Belajar. Retrieved from <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020b, May 6). Reformasi Pendidikan Nasional Melalui Merdeka Belajar. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/reformasi-pendidikan-nasional-melalui-merdeka-belajar>
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. Wilton, Connecticut: Association Press.
- Knowles, M. S. (1984). *Andragogy in Action*. San Francisco, United States: Jossey-Bass Inc.
- Kompas.com. (2019, December 12). Gebrakan "Merdeka Belajar", Berikut 4 Penjelasan Mendikbud Nadiem Halaman all - Kompas.com. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all>
- Medcom.id. (2020, July 13). Memahami Konsep Merdeka Belajar Gagasan Ki Hadjar - Medcom.id. *Medcom.Id*. Retrieved from <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/xkEYPypk-memahami-konsep-merdeka-belajar-gagasan-ki-hadjar#:~:text=Putra%20dari%20Ki%20Hadi%20Sukitno,harapan%20tak%20digerus%20perkembangan%20zaman>
- Neill, A. S. (1960). *Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing*. New York, United States: Hart Publishing Company.

- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing.
- Syukur, I. A. (2014). Profesionalisme Guru dalam Mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), 200-210. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.138>
- Tempo. (2019, December 13). Nadiem Makarim: Dunia Tak Butuh Anak-anak yang Jago Menghafal. *Tempo*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1283124/nadiem-makarim-dunia-tak-butuh-anak-anak-yang-jago-menghafal>

Tentang Penulis

1. **Yuhastina** memperoleh gelar Doktor dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
E-Mail: yuhastina@staff.uns.ac.id
2. **Bagas Narendra Parahita** memperoleh gelar Magister dalam bidang Sosiologi dari Universitas Sebelas Maret, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
E-Mail: bagasnarendrap@staff.uns.ac.id
3. **Dwi Astutik** memperoleh gelar Magister dalam bidang Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
E-Mail: dwiastutik@staff.uns.ac.id
4. **Ghufronudin** memperoleh gelar Magister dalam bidang Sosiologi dari Universitas Sebelas Maret, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
E-Mail: ghufron.udin@staff.uns.ac.id
5. **Danang Purwanto** memperoleh gelar Doktor dalam bidang Sociologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
E-Mail: mdpur@staff.uns.ac.id